

pelaksanaannya, implementasi manajemen mutu pendidikan di sejumlah sekolah belum berjalan optimal akibat minimnya peran dan dukungan Komite Sekolah. Hal ini tercermin dari hasil Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD), meskipun Kota Yogyakarta secara umum menduduki peringkat pertama dalam hasil Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah (ASPD) se-Provinsi DIY, namun kesenjangan mutu antar-satuan pendidikan masih terlihat sangat nyata. Fenomena ini ditemukan pada SDN Bener dan SDN Karangrejo yang menempati peringkat bawah di Kota Yogyakarta, masing-masing pada posisi 147 dan 88 dari 169 sekolah. Rendahnya prestasi akademik tersebut mengindikasikan bahwa program manajemen mutu pendidikan belum terlaksana secara optimal di tingkat sekolah. Oleh sebab itu, manajemen mutu pendidikan di sekolah harus dijalankan dengan baik, dengan harapan dapat meningkatkan mutu sekolah.

Komite sekolah merupakan organisasi yang bertujuan untuk menggabungkan dan menjadi tempat untuk menyatukan visi dan misi pendidikan di lingkungan Masyarakat (Faradina *et al.*, 2024). Tujuan dibentuknya komite diantaranya yakni menghimpun dan menyalurkan harapan dan inisiatif masyarakat dalam menghasilkan kebijakan operasional, memperkuat tanggung jawab dan kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan di lembaga pendidikan dan membangun suasana dan keadaan yang jelas, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang berkualitas di satuan pendidikan. Komite sekolah berfungsi sebagai wadah bagi orangtua atau anggota masyarakat yang peduli terhadap pendidikan untuk berkontribusi dalam memajukan pendidikan di sekolah, seperti membantu dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan meningkatkan kesejahteraan guru (Lestariningsih, 2024).

Konsep Manajemen Mutu Terpadu (MMT) merujuk pada konsep pencapaian nilai kepuasan terkait kualitas pelayanan diberikan. Menurut Crosby dalam (Purwaningsih, 2022) menjelaskan bahwa mutu merupakan kesatuan dari atribut-atribut produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi persyaratan atau kebutuhan pelanggan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, termasuk kebutuhan yang bersifat tersurat (eksplisit) dan tersirat (implisit). Mutu pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik peserta didik, tetapi juga dari kualitas layanan pendidikan, efektivitas manajemen sekolah, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan

dalam proses pendidikan (Nelliraharti, 2018). Implementasi manajemen mutu yang efektif bergantung pada dukungan pemangku kepentingan, terutama oleh Komite Sekolah sebagai organisasi mandiri yang menjembatani hubungan antara sekolah dan masyarakat. Namun realitas di lapangan menunjukkan adanya permasalahan yang ada dalam implementasi manajemen mutu seperti kurangnya sumber daya, tidak meratanya kualifikasi guru yang ada di sekolah, kurangnya pelatihan guru dan staff, pengelolaan data yang belum optimal, kurangnya keterlibatan orangtua, kurikulum yang tidak selaras dengan kebutuhan siswa, serta proses evaluasi kinerja guru yang tidak efektif (Ismail, 2024).

Di beberapa sekolah, komite berperan aktif dalam mengawasi dan menilai kinerja sekolah, partisipasi masyarakat, membantu pengembangan program pendidikan, pengelolaan sumber daya, memantau dan mengevaluasi kualitas layanan pendidikan, memastikan kesetaraan serta menanggapi keluhan dan masukan (Octaviana *et al.*, 2023) Namun, di banyak sekolah lainnya, peran komite seringkali terbatas, baik karena kurangnya pemahaman akan tugas dan fungsi mereka, maupun minimnya komunikasi dan kolaborasi yang terjalin antara komite dan pihak sekolah. Beberapa tahun terakhir, telah terlihat penurunan partisipasi masyarakat di banyak sekolah. Ini adalah masalah yang sangat serius karena dampaknya dapat mempengaruhi pengembangan pendidikan dan kualitas hasil belajar siswa. Dalam beberapa kasus, orangtua dan wali murid tidak cukup aktif berpartisipasi dalam kegiatan sekolah, seperti pertemuan antara guru dengan orangtua, pendanaan sekolah, atau mendukung kegiatan ekstrakurikuler

Mayoritas masyarakat cenderung memiliki persepsi bahwa tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan guru. Kondisi tersebut disebabkan karena kurangnya pemahaman kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran dan kontribusi masyarakat dalam pendidikan (Saputra, 2022). Hal tersebut mengakibatkan peran serta komite sekolah sebagai pengontrol kebijakan sekolah sering terabaikan (Abdullah, 2018). Padahal, Makmun (2023) menegaskan bahwa keterlibatan aktif komite dalam memantau program sekolah adalah faktor pendukung utama dalam menciptakan akuntabilitas manajemen mutu. Faktor lain yang juga signifikan adalah minimnya keterlibatan orangtua dalam proses pendidikan yakni dukungan orangtua terhadap

pembelajaran anak di rumah maupun dalam memantau perkembangan pendidikan mereka masih tergolong rendah (Anwar *et al.*, 2023) Selama ini, partisipasi orangtua hanya sebatas sebagai sumber dana, tanpa peran aktif dalam proses pendidikan seperti pengambilan keputusan, pemantauan, evaluasi, dan akuntabilitas. Selain itu upaya seperti pelatihan guru, perolehan bahan ajar, dan perbaikan fasilitas pendidikan sering kali tidak merata di seluruh wilayah. Sekolah-sekolah di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan akses sumber daya mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sama dengan sekolah di kota besar. Hal ini diperlukan upaya kolaborasi antara seluruh *stakeholder* terkait seperti: pemerintah, sekolah, guru, orangtua, untuk meningkatkan manajemen mutu, mulai dari peningkatan sumber daya hingga peningkatan kualifikasi guru dan pengelolaan data yang lebih baik (Winoto, 2021).

Selain itu terdapat beberapa hal yang menghambat komite sekolah dalam melaksanakan perannya. Beberapa faktor yang menghambat komite sekolah melaksanakan perannya termasuk pemahaman yang terbatas mengenai peran dan tanggung jawab komite (Saekul, 2022). Dalam beberapa kasus, tugas atau peran komite ini belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan aturan-aturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh departemen pendidikan (Mataputun, 2020). Ketidakseimbangan gender dalam komite juga dapat membatasi partisipasi mereka dalam memantau proyek sekolah (Zacharia *et al.*, 2023). Anggota komite yang tidak aktif dan kurangnya pemahaman tentang peran komite dapat menghambat efektivitas mereka Selain itu, perspektif orangtua tentang sistem pendidikan gratis dapat menciptakan hambatan bagi panitia dalam memenuhi tugas mereka. Faktor-faktor ini menyoroti perlunya pengembangan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan bagi pengurus komite sekolah untuk meningkatkan pemahaman serta efektivitas mereka untuk melaksanakan peran dan tanggung jawab.

Ketidakterlaksanaan manajemen mutu ini berakar pada lemahnya dukungan pemangku kepentingan (*stakeholder*), khususnya Komite Sekolah. Berdasarkan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Komite Sekolah memiliki peran strategis sebagai lembaga mandiri yang menjalankan fungsi pertimbangan, pendukung, pengontrol, dan penghubung. Namun, realita di lapangan menunjukkan adanya penurunan partisipasi masyarakat dan keterlibatan orang tua cenderung terbatas pada aspek finansial dan

belum menyentuh substansi pengelolaan pendidikan maupun evaluasi akademik. Kurangnya pemahaman mengenai tupoksi serta lemahnya pola komunikasi antara sekolah dan masyarakat menyebabkan komite belum mampu menjalankan fungsinya sebagai pengawas kinerja sekolah secara efektif.

Beberapa penelitian terdahulu Fahrur dan Haryanto (2023) menemukan bahwa keterlibatan komite sekolah dan paguyuban lebih dominan dalam mendukung kegiatan administratif dan penggalangan dukungan kegiatan non akademik daripada fungsi pengawasan akademik. Penelitian (Yasin *et al.*, 2021) juga menunjukkan bahwa komunikasi antara sekolah dan komite sekolah belum terbangun secara efektif dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Sementara itu, penelitian (Augustyn *et al.*, 2023) menyimpulkan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan oleh komite sekolah masih lemah dan belum berdampak signifikan terhadap kebijakan akademik sekolah. Beberapa penelitian tersebut memiliki kesamaan yaitu dalam variabel peran komite sekolah dan mutu pendidikan serta sebagian besar penelitian meneliti tentang pengaruh peran komite terhadap peningkatan mutu pendidikan secara umum.

Manajemen Mutu Terpadu (MMT) atau *Total Quality Management* (TQM) dalam pendidikan menekankan perbaikan berkelanjutan melalui keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Dalam hal ini, komite sekolah memiliki peran strategis sebagai *stakeholder* sekunder yang berfungsi memberikan pertimbangan kebijakan, dukungan sumber daya, pengawasan, serta menjembatani hubungan antara sekolah dan masyarakat. Namun pada beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa peran komite sekolah belum terlaksana secara optimal dan masih terbatas pada fungsi administrative atau pengaruhnya terhadap mutu pendidikan secara parsial, sehingga kontribusinya terhadap manajemen mutu pendidikan belum maksimal.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara peran ideal komite sekolah sebagaimana diamanatkan dalam regulasi dan teori manajemen mutu dengan praktik yang terjadi di lapangan. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan mengkaji peran komite sekolah dalam manajemen mutu pendidikan secara komprehensif, mencakup fungsi pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas, dan penghubung, serta keterlibatannya dalam seluruh tahapan manajemen mutu. Penelitian ini

difokuskan pada SDN Bener dan SDN Karangrejo di Kemantren Tegalrejo untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peran komite sekolah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif yang mana memahami fenomena dan sudut pandang subjek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di SDN Karangrejo yang beralamat di Jl Sidomulyo RT IV/371 Kec Tegalrejo Kota Yogyakarta, dan dilakukan di SDN Bener yang berlokasi di Bener RT 01, RW 01 Bener, Kecamatan Tegalrejo. Penelitian ini dilakukan dari bulan Januari hingga Agustus tahun 2024. Responden dalam penelitian ini adalah pengurus komite sekolah yang meliputi penasehat, kepala sekolah, ketua komite, bendahara, sekretaris.

Sumber data dari penelitian ini ialah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara terhadap responden dan dokumentasi, data tertulis meliputi foto, daftar hadir, SK, serta notulen rapat sedangkan data sekunder didapatkan dari kajian teori dari buku dan jurnal-jurnal terkait. Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam mengenai peran komite dalam manajemen mutu pendidikan, mekanisme transparansi dan akuntabilitas, serta hambatan yang dihadapi komite. Sementara itu, metode dokumentasi digunakan untuk menyelidiki berbagai catatan tertulis, seperti daftar hadir, foto, notulen rapat, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan supervisi akademik kepala sekolah dan peran komite. Metode ini berfungsi sebagai pelengkap wawancara untuk menyediakan bukti konkret, memperkuat hasil penelitian, serta mengumpulkan informasi terkait sejarah, visi, misi, struktur organisasi sekolah, dan aspek penting lainnya.

Penelitian ini dilakukan melalui empat tahap utama yakni pertama, pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi, yaitu wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan komite di SDN Karangrejo dan SDN Bener Yogyakarta, serta dokumentasi berupa catatan dan foto. Kondensasi data dilakukan dengan memilah informasi relevan terkait peran komite dalam manajemen mutu pendidikan, mengklarifikasi, dan menyunting data sesuai situasi sebenarnya. Kedua, penyajian data berbentuk deskripsi faktual yang disusun berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dengan fokus keterlibatan masyarakat dalam

manajemen mutu pendidikan. Ketiga, analisis data digunakan untuk menyimpulkan hasil yang dicapai untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan memberikan pemahaman terkait fenomena penelitian yang dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari empat tahapan utama di antaranya reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Keempat, penarikan kesimpulan dilakukan secara iteratif, dimulai dengan kesimpulan sementara yang diverifikasi ulang hingga bukti yang mendukung dianggap cukup, sehingga menghasilkan kesimpulan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian ini komite telah berperan dalam manajemen mutu pendidikan juga dapat mengambil peran sebagai badan pertimbangan (*advisory agency*) dalam fungsi advokasi dan komunikasi serta pemberdayaan tenaga pendidik dan karyawan. Komite sekolah memainkan peran penting dalam advokasi dan pengembangan sumber daya dalam lembaga pendidikan. Komite sekolah memainkan peran penting dalam pengembangan sumber daya dengan mendukung pengelolaan sumber daya, fasilitas, infrastruktur, dan pengelolaan anggaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tanggung jawab mereka termasuk memberikan pertimbangan untuk kebijakan pendidikan, mengumpulkan dana, dan mengevaluasi layanan pendidikan.

Peran komite sebagai pemberi pertimbangan terkait kebijakan dan keputusan pendidikan dapat dijelaskan dengan *theory of participatory governance*. Teori ini menyatakan bahwa melibatkan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan meningkatkan kualitas keputusan karena memperhitungkan berbagai perspektif. Komite sekolah yang berfungsi sebagai pemberi pertimbangan memainkan peran penting dalam memberikan masukan strategis yang memperbaiki kebijakan sekolah, seperti alokasi anggaran atau kurikulum.

Peran komite dalam pertimbangan terkait dengan kebijakan dan program pendidikan, komite berupaya untuk melaksanakan agenda pertemuan secara berkala dengan orang tua dan anggota masyarakat dengan agenda pertemuan untuk penyusunan program pelajaran dan pendidikan yang akan dilaksanakan tiap semester. Pada peran ini komite menerima masukan baik langsung ataupun tidak langsung untuk selanjutnya berkoordinasi dengan sesama pengurus guna mendapatkan gambaran solusi

sebelum di lanjut dengan koordinasi dengan pihak sekolah. Peran komite dalam memberikan pertimbangan terkait rencana anggaran pendapatan belanja sekolah, hal ini dilakukan dengan sekolah memaparkan menyampaikan sumber anggaran yang diperoleh dan komite memiliki hak untuk menyampaikan saran dan masukan untuk perencanaan anggaran. Peran komite dalam memberikan pertimbangan serta masukan dalam penetapan kinerja sekolah serta pengembangan sumber daya, dalam pengembangan sumber daya komite sekolah dapat mensosialisasikan usulan kebijakan dan program pendidikan kepada masyarakat, selain itu komite sekolah dapat memberikan pertimbangan tentang kondisi tenaga kependidikan di sekolah. Penyampaiannya dapat melalui forum rapat dengan guru beserta staf atau bisa juga dilakukan audiensi dengan kepala sekolah serta selama pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, komite dapat melakukan pemantauan terhadap kondisi tenaga kependidikan di sekolah.

Dalam penelitian ini peran komite sebagai pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*) SDN Karangrejo yakni komite berperan memberikan pertimbangan dalam kebijakan dan program pendidikan adalah sebagai jembatan antara orangtua siswa dengan guru atau pengelola sekolah dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS), dalam kriteria penetapan kinerja sekolah yaitu menjaga dan mengawasi kinerja sekolah, membantu mengevaluasi kinerja tenaga pendidik, serta melakukan pengamatan dan pengecekan fasilitas pendidikan. Sedangkan peran komite sebagai pemberi pertimbangan (*Advisory Agency*) SDN Bener yakni komite selalu diundang dalam merencanakan awal untuk penyusunan program pelajaran dan pendidikan di SDN Bener untuk tiap semesternya karena komite merupakan perwakilan wali Murid. Komite di undang dalam sosialisasi terkait Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (RAPBS) beserta anggaran yang didapatkan. Komite juga diundang oleh sekolah dalam hal ini di minta masukan dan pendapat tentang ketentuan, serta mendengarkan paparan yang disampaikan sekolah terkait penetapan kinerja sekolah, kriteria tenaga kependidikan. Komite diberi kesempatan untuk menyampaikan masukan dan diberi kesempatan untuk ikut mengevaluasi kinerja tenaga pendidik dan staf yang terlibat di sekolah), kriteria fasilitas pendidikan baik secara kualitas maupun kuantitas.

Komite sekolah memainkan peran sebagai badan pendukung (*supporting agency*) dalam

fungsi pelaporan dan komunikasi di dalam lembaga pendidikan. Komite sekolah memainkan peran penting dalam pelaporan dan komunikasi dengan bertindak sebagai saluran pertimbangan, memberikan dukungan, mengendalikan anggaran, dan mediasi antara sekolah dan pemangku kepentingan. Komite sekolah memainkan peran penting dalam menghubungkan komunikasi dengan pihak berwenang, seperti pemerintah dan sebagai bagian dari pemasaran lembaga Pendidikan. Komite dapat menerima laporan kegiatan sekolah, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, dan menanganikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara efektif.

Komite yang berperan sebagai pendukung bisa dijelaskan melalui *Resource Dependency Theory*, yang menyatakan bahwa organisasi seperti sekolah membutuhkan dukungan eksternal berupa sumber daya finansial, infrastruktur, dan sosial. Peran komite sebagai pendukung dapat berupa penggalangan dana, memfasilitasi pelatihan guru, atau menyediakan akses ke jaringan eksternal yang mendukung operasional sekolah dan program-program pendidikan .

Komite sekolah dapat mengupayakan bantuan keuangan dari bisnis dan industri untuk mengurangi biaya sekolah bagi siswa dari latar belakang kurang beruntung. Peran komite sebagai pendukung selanjutnya adalah dengan turut membantu keterlibatan anggota masyarakat dan orang tua dengan cara menawarkan dukungan kepada sekolah dalam memfasilitasi kebutuhan sekolah seperti bantuan berupa barang atau dana untuk kegiatan siswa di sekolah dengan catatan itu bantuan yang diberikan bersifat sukarela. Komite juga berperan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan siswa dengan mengusulkan untuk mengundang dokter atau puskesmas terkait untuk cek kesehatan bagi siswa dan komite dapat turut serta mengawasi dalam proses pemeriksaan kesehatan tersebut. Komite dapat memberikan dukungannya dengan memperluas dukungan keuangan ke sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler. Komite berperan serta sebagai pendukung dalam mengadakan kegiatan atau pertemuan secara berkala dengan orang tua dan anggota masyarakat, komite dapat membantu dan menjembatani apabila ada keperluan yang harus segera di laksanakan oleh sekolah. Sementara untuk mengevaluasi pelaksanaan dukungan anggaran di sekolah, komite dapat mengecek apakah dukungan anggaran sudah sesuai regulasinya dan peruntukannya dimana komite juga dapat

memberikan masukan dan berkoordinasi kepada sekolah. Hal berikutnya terkait jika ada kekurangan guru, tindakan pertama yang dilakukan komite adalah melihat anggaran yang ada, komite dapat memberikan surat rekomendasi kepada dinas pendidikan untuk merekrut guru baru.

Dalam penelitian ini peran komite sebagai pendukung (*support agency*) di SDN Karangrejo yakni komite mengadakan pertemuan rutin secara berkala, mencari anggaran melalui donatur, mengusulkan mengundang dokter dalam kegiatan pengecekan kesehatan siswa, mengadakan iuran tidak wajib sebagai pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Sedangkan peran komite sebagai pendukung (*support agency*) di SDN Bener yakni mengadakan pertemuan rutin secara berkala, mencari dukungan dana dari pihak luar serta memperbolehkan adanya bantuan barang atau dana, mendukung dan menyetujui kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah seperti pemeriksaan kesehatan siswa dan mendukung permintaan dana bantuan kepada wali murid untuk pengembangan kegiatan ekstrakurikuler dengan disepakati oleh masing-masing wali murid.

Peran komite sekolah sebagai badan pengontrol (*controlling agency*) dapat dijalankan dalam fungsi pengawasan dan evaluasi kualitas sekolah yang sangat beragam dan penting untuk peningkatan mutu pendidikan. Komite sekolah secara aktif mengawasi dan mengevaluasi kualitas sekolah melalui penilaian berkelanjutan, alokasi sumber daya, dan pemecahan masalah, berkontribusi signifikan untuk meningkatkan kualitas Pendidikan.

Dalam perannya sebagai pengontrol (*controlling agency*) dalam manajemen mutu pendidikan, komite dapat mengawasi proses pengambilan keputusan sekolah. Peran kontrol ini dapat dilakukan melalui dua proses yaitu mengadakan evaluasi berkala dan menyajikan laporan komprehensif. Secara umum peran komite sekolah dalam mengontrol penjadwalan program sekolah dan anggaran sekolah dapat dilakukan dengan bermacam cara seperti terlibat dalam perencanaan dan memberikan persetujuan terhadap jadwal program dan anggaran. melakukan pengawasan terhadap implementasi jadwal program dan alokasi anggaran untuk memastikan sesuai dengan rencana, melakukan evaluasi berkala dan penyesuaian jika diperlukan, memastikan transparansi dalam seluruh proses kepada semua pihak terkait serta bertanggung jawab atas

pelaporan hasil pengawasan kepada pihak yang berwenang atau masyarakat sekolah

Dalam hal kontrol proses pelaksanaan pendidikan di sekolah komite dapat menjalankan dengan dua cara yakni melalui pengecekan langsung saat proses pembelajaran berlangsung bisa berupa pertemuan berkala untuk melihat cara mengajar guru atau melalui tanya jawab/sharing dengan orang tua peserta didik, guru dan peserta didik sendiri, serta pengecekan tidak langsung melalui rapat pleno, komite dapat melihat laporan dari kepala sekolah, komite juga bisa memantau pelaksanaan pembelajaran melalui kurikulum sekolah. Dalam peran pengontrol, komite berfungsi mengawasi dan mengevaluasi kinerja sekolah dan pemangku kepentingan lainnya. Teori yang relevan adalah *Agency Theory*, yang menjelaskan bahwa komite bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan masyarakat dalam memastikan sekolah dijalankan secara efektif dan efisien. Mereka mengawasi pelaksanaan kebijakan, penggunaan anggaran, serta memastikan pencapaian standar mutu pendidikan

Komite sekolah dapat memberikan masukan atau usulan terhadap pengelolaan Pendidikan, misalnya saat diundang dalam sosialisasi kurikulum baru atau bila ada perubahan kurikulum Pendidikan. Komite sekolah juga dapat memberikan masukan atau pertimbangan terhadap guru dalam proses pembelajaran. Komite sekolah dapat berkolaborasi dengan kepala sekolah dan staf administrasi untuk merencanakan dan menyusun program pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan guru.

Dalam penelitian ini peran komite sebagai pengontrol (*controlling agency*) di SDN Karangrejo yakni komite melaksanakan evaluasi berkala pada setiap penyelenggaraan program sekolah dan melaporkan hasilnya kepada pemangku kepentingan serta menyajikan laporan komprehensif tentang pemanfaatan bantuan masyarakat apakah itu didanai atau tidak didanai, namun komite kurang memahami karena hanya memantau saja. Sedangkan peran komite sebagai pengontrol (*controlling agency*) di SDN Bener berupa melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program sekolah dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pemangku kepentingan terkait, menyoroti keberhasilan dan kekurangan, komite melaksanakan rapat komite bersama pengurus forum kelas dan pihak sekolah. Sementara peran komite dalam menyajikan laporan komprehensif tentang pemanfaatan bantuan masyarakat, apakah itu didanai atau tidak didanai, kepada masyarakat

dan pemerintah lokal, komite terbuka dan siap memberi jawaban bila terkait apapun tentang kegiatan sekolah sesuai apa yang komite ketahui dan yang di terima untuk informasi dan laporan.

Dalam perannya sebagai mediator dalam manajemen mutu pendidikan, komite dapat menjalankan fungsi kolaborasi dengan pihak eksternal. mite sekolah menjembatani kepentingan sekolah dengan masyarakat. Pada dasarnya komite sekolah berperan sebagai mediator antara sekolah, masyarakat, dan dinas pendidikan dalam meningkatkan mutu sekolah dan layanan pendidikan serta alokasi sumber daya

Komite yang bertindak sebagai mediator menghubungkan sekolah dengan berbagai pihak seperti orang tua, komunitas, dan pemerintah. *Conflict Resolution Theory* relevan di sini, yang menyatakan bahwa mediator bertindak sebagai fasilitator dalam menyelesaikan konflik, mempertemukan kepentingan berbeda, dan mempromosikan dialog terbuka antara pemangku kepentingan. Dalam konteks sekolah, komite berperan dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul antara orang tua dan guru atau antara sekolah dan masyarakat.

Komite sekolah dapat mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk perencanaan Pendidikan yang lebih inklusif. Dengan membuka layanan informasi WA langsung jawab, melalui wawancara terbuka secara langsung. Komite sekolah menampung keluhan dan aspirasi masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program kerja sekolah. Komite sekolah mengumpulkan aspirasi masyarakat untuk perencanaan pendidikan melalui rapat rutin yang dilakukan oleh komite bersama dengan masyarakat, dan rapat itulah didapatkan aspirasi-aspirasi masyarakat mengenai sekolah. Berdasarkan dari hal tersebut peran komite sebagai mediator yakni sebagai penanggung jawab dan penghubung antara kepentingan eksekutif pemerintah dan publik sebagai pemangku kepentingan.

Pada penelitian ini peran komite sebagai mediator di SDN Karangrejo yakni komite berperan dalam menjembatani komunikasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan sekolah sebagai upaya dalam menjaga persatuan dan kesatuan untuk semua yang ada berada lingkungan sekolah dan masyarakat. Sedangkan peran komite sebagai mediator di SDN Bener yakni komite dalam menjembatani komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam lingkungan sekolah, Komite menyampaikan dalam rapat komite beserta sekolah bahwa pengurus komite dari ketua

komite, sekretaris komite dan bendahara komite untuk dapat berkoordinasi, dan melakukan komunikasi, serta mengharapkan selalu aktif ontime untuk mendengar dan menerima masukan informasi serta laporan dari wali murid sehingga diharapkan komite dapat mengikuti perkembangan terbaru bila ada laporan dari wali murid yang bersifat membangun dan membenahi bila ada ke tidak puas dari wali murid terhadap pembelajaran di Sekolah.

4. Simpulan dan Saran

Merujuk dari hasil temuan hasil analisis analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah komite sekolah di SDN Karangrejo dan SDN Bener telah menjalankan fungsi dan perannya dalam program manajemen mutu pendidikan di sekolah untuk meningkatkan hasil ASPD sekolah melalui 4 peran diantaranya Komite sekolah berperan memberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam manajemen mutu pendidikan melalui fungsi advokasi dan pengembangan sumber daya yang dilakukan. Peran ini terlihat melalui keterlibatan komite dalam pemberian pertimbangan terkait kebijakan dan program pendidikan di sekolah, dan pemberdayaan tenaga pendidik serta tenaga kependidikan baik di SDN Karangrejo dan SDN Bener Yogyakarta. Komite sebagai pemberi pertimbangan di SDN Karangrejo lebih kepada menghubungkan antara kepentingan sekolah dengan orangtua sementara peran komite di SDN Bener terlibat secara aktif dalam setiap awal perencanaan program pendidikan hingga penetapan anggaran pendapatan belanja sekolah. Keduanya juga terlibat dalam proses evaluasi kinerja tenaga pendidik, serta melakukan pengamatan dan pengecekan fasilitas pendidikan

Komite sekolah memiliki peran pendukung (*supporting agency*) dalam manajemen mutu pendidikan melalui fungsi pelaporan dan komunikasi. Komite sekolah melakukan peran ini untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas manajemen mutu pendidikan. Peran ini diwujudkan dalam evaluasi dan pelaporan kinerja dan dalam keterlibatannya untuk mengesahkan baik dalam laporan keuangan, kurikulum sehingga dapat diteruskan ke dinas. Komite sebagai pendukung di SDN Karangrejo dan SDN Bener melakukan pertemuan secara berkala. Terkait hal dana untuk pendidikan komite mengizinkan permintaan bantuan barang atau uang kepada wali murid secara sukarela. Sedangkan di SDN Karangrejo lebih aktif dalam perannya dengan

mencarikan donatur atau menitipkan barang dagangan di kantin yang nanti keuntungannya bisa diberikan kepada siswa.

Komite sekolah memiliki peran pengontrol dalam manajemen mutu pendidikan melalui kegiatan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan. Implementasi peran pengawasan dari komite sekolah dalam manajemen mutu pendidikan diwujudkan dalam 4 hal yaitu pengembangan dan pemantauan kebijakan mutu, penyusunan dan evaluasi rencana kerja mutu, partisipasi dalam akreditasi dan keterlibatan dalam peningkatan proses pembelajaran. Peran komite sebagai pengontrol di SDN Karangrejo dan SDN Bener Yogyakarta sama-sama melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program sekolah. Sementara untuk pelaporan secara komprehensif terkhusus dalam hal bantuan dari masyarakat, komite di SDN Bener mengetahuinya dan siap secara terbuka mempertanggung-jawabkannya sementara di SDN Karangrejo komite mengaku kurang memahami hal tersebut karena fungsinya hanya sebagai pengawas saja

Komite sekolah berperan sebagai mediator dalam manajemen mutu pendidikan dapat diwujudkan dalam fungsi melakukan kolaborasi dengan pihak eksternal. Komite dalam kontribusinya terhadap peningkatan mutu Pendidikan di SDN Karangrejo dan SDN Bener Yogyakarta telah melakukan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* terkait (orang tua siswa, masyarakat dan dinas pendidikan) dan pengelolaan sumber daya meliputi sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Peran komite sebagai mediator, SDN Karangrejo melakukan upaya dengan menjaga persatuan dan kesatuan, sedangkan di SD N Bener pihak komite selalu aktif untuk mendengar, menerima informasi dari wali murid, sehingga apabila ada permasalahan di kelas dapat terselesaikan.

Berdasarkan dari hasil temuan pada penelitian ini saran yang diberikan dalam meningkatkan peran komite dalam manajemen mutu pendidikan meliputi kepala sekolah diharapkan lebih proaktif melibatkan komite sekolah, misalnya dengan mengundang komite dalam setiap pertemuan, meminta pertimbangan, dan mengomunikasikan program sekolah, selanjutnya Komite Sekolah diharapkan lebih aktif menjalankan peran seperti mengukur pencapaian sasaran mutu menggunakan alat ukur terstandar, membuat template laporan komprehensif, menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, dan membangun sistem informasi untuk pelaporan yang lebih efektif, serta peranserta guru untuk aktif dalam pertemuan

dengan komite memberikan masukan dan saran. Selanjutnya saran bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas objek penelitian dengan latar belakang berbeda seperti sekolah swasta dan negeri lain guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, memfokuskan pada peran spesifik komite sekolah untuk menggali dampak dan efektivitas peran tersebut secara lebih mendalam serta keterlibatan stakeholder lain dalam penelitian guna mengeksplor pandangan dari guru dan orang tua guna memahami dinamika kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. (2018). Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Di Sekolah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 17(3), 190–198. <https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9612>
- Anwar, S., & Khaesar, K. (2023). Partisipasi komite sekolah dalam mengawasi mutu pendidikan. *Jurnal Genta Mulia*, 14(2). <https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/571/440>
- Augustyn, S., Wenno, I. H., & Lokollo, L. J. (2023). Peran Komite Sekolah dalam Mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah pada Lingkup Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. J. B. Sitanala Cabang Masohi Maluku Tengah. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 4(2), 1163–1172. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v4i2.409>
- Fahrur, A., & Haryanto, B. (2023). The Role of School Committees and Associations in Supporting Competitive Advantage in Muhammadiyah Elementary School 2 Krian: Peran Komite Sekolah dan Paguyuban dalam Mendukung Keunggulan Bersaing di Sekolah Dasar Muhammadiyah 2 Krian. *Journal of Islamic and Muhammadiyah Studies*, 5, Article 1583. <https://doi.org/10.21070/jims.v5i0.1583>.
- Faradina, M., Maula, S., Fitroh, S., & Noviyanti, N. (2024). Empowering school committees: Concrete steps to improve the quality of education. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v8i2.7116>

- Ismail B. (2024). Peran Komite Sekolah terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi*, 1(2), 118–132. <https://doi.org/10.62335/sfpe3g17>
- Lestaringtyas, L. (2024). Manajemen berbasis sekolah melalui pemberdayaan masyarakat dan peran komite serta tantangan pelaksanaannya. *Jurnal Inovasi Pembelajaran di Sekolah*, 5(1), 77–86. <https://doi.org/10.51874/jips.v5i1.225>.
- Makmun, M. (2023). The role of school committees in improving the quality of education (Study case at SMK Negeri 2 Metro). *Syntax Idea*, 5(3). <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i3.2142>
- Mataputun, A. (2020). Implementasi tugas komite sekolah dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan di SMA Negeri 2 Kabupaten Sarmi. *NOKEN: Jurnal Pengelolaan Pendidikan*, 1(1). <https://doi.org/10.31957/NOKEN.V1I1.1280>
- Nelliraharti. (2018). Peran komite sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. *Journal of Education Science*, 4(2), 17–25. <https://jurnal.uui.ac.id/index.php/jes/article/view/287/0>
- Oktaviana, D., Shalsabila, R. S., & Rustini, T. (2023). The role of school committees in optimizing administration in elementary schools. *AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.57235/aurelia.v2i2.624>.
- Purwaningsih, E. (2022). Peningkatan mutu sekolah perspektif Philip B. Crosby. *Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains*, 11(1). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10715>.
- Saekul, A. (2022). Role of the school committee as a mediator between educational institutions and village communities in Madrasah Tsanawiyah, Gabus Sub-district, Grobogan Regency. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2). <https://doi.org/10.33509/jan.v28i2.1712>
- Saputra, A. N. (2022). Peranan Dewan Pendidikan Dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Di Kota Palopo. *Jurnal Arajang*, 5(1), 92–102. <https://doi.org/10.31605/arajang.v5i1.2517>
- Zacharia, S., Masanyiwa., Berine, R., Magaria., Nzoja, E., Shauri. (2023). Participation in School Committees in Monitoring Primary School Projects in the Nyang'hwale District in Tanzania. *Rural Planning Journal*. <https://doi.org/10.59557/kykk3z52>.
- Winoto, S. (2021). *Komite Sekolah/Madrasah dan Manajemen Mutu Pendidikan*. Bildung: Yogyakarta.
- Yasin, M., Apriana, D., Sururuddin, M., & Hamzanwadi, U. (2021). Pola Komunikasi Sekolah dengan Komite Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 6305–6312. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1945/1720>.